

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DI BIDANG KELEMBAGAAN

Kegiatan di bidang kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam periode 1998-2004 yang merupakan era reformasi, telah mengalami perubahan yang mendasar yang mendudukkan BPK-RI sebagai satu-satunya lembaga ekstern pemeriksaan keuangan negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan, tugas, dan kewajiban dimaksud di samping diamanatkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, juga dimuat dalam Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, baik TAP MPR RI No. VIII/MPR/2000, TAP MPR RI No. X/MPR/2001, TAP MPR RI No. VI/MPR/2002, maupun dalam TAP MPR RI No. 5/MPR/2003. Materi rekomendasi tersebut, masing-masing adalah sebagai berikut :

TAP MPR RI No. VIII/MPR/2000

- a. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaan, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen, dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih memantapkan peranannya sebagai Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang independen.
- c. Perlu segera diadakannya 3 (tiga) undang-undang yaitu : (1) Undang-undang tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Kelengkapan berbagai temuan penyimpangan, perlu segera dilengkapi untuk mendukung proses hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

TAP MPR RI No. X/MPR/2001

- a. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen.
- b. Badan Pemeriksa Keuangan perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap Lembaga-lembaga Tinggi Negara, institusi pemerintahan, BUMN, dan BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.
- c. Badan Pemeriksa Keuangan perlu didukung kualitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.
- d. Berbagai temuan penyimpangan/persoalan pidana, perlu segera dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dan/atau Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

TAP MPR RI No. VI/MPR/2002

- a. Menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan eksternal Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, dan peranannya yang bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan.
- b. Perlu peningkatan kinerja BPK dengan dukungan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.
- c. Perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.
- d. Merekomendasikan kepada Pemerintah sesuai dengan kedudukan BPK sebagai auditor eksternal, perlu menata kembali kelembagaan

dan mekanisme pemeriksaan keuangan internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawasan Daerah) untuk menghilangkan duplikasi pemeriksaan dan pemeriksaan yang menjadi kedok KKN.

- e. Kerja sama BPK dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diefektifkan realisasinya untuk mempercepat proses penyelesaian hukum yang menyangkut berbagai temuan penyimpangan dan persoalan pidana.

TAP MPR RI No. 5/MPR/2003

- a. Sungguh-sungguh berupaya memposisikan BPK sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945, antara lain melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang selektif, penerapan sistem kerja yang efektif dan efisien serta didukung oleh sarana, prasarana dan dana yang memadai.
- b. Meningkatkan disiplin BPK-RI melalui penerapan program sistem evaluasi dan monitoring internal secara intensif dan terukur.
- c. BPK dan Presiden perlu melakukan pembahasan yang mendalam dan mengambil keputusan yang tegas tentang keberadaan dan atau ruang lingkup tugas BPKP agar tidak terjadi lagi konflik tugas BPK.
- d. Pemeriksaan keuangan terhadap lembaga yang menggunakan keuangan negara seperti lembaga-lembaga tinggi negara, institusi pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan lain-lain perlu terus ditingkatkan kuantitas, kualitas, dan kredibilitasnya.
- e. BPK hendaknya menjadikan semua temuannya bermanfaat bagi aparaturnya pelaksana, masyarakat dan negara.

Berdasarkan rekomendasi tersebut BPK-RI agar menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa ekstern Keuangan Negara yang bekerja sesuai dengan praktik-praktik internasional terbaik dalam rangka menjalankan perannya sebagai auditor independen.

Sebagai tindak-lanjut rekomendasi yang dimuat dalam TAP MPR No. VIII/MPR/2000, pada tahun 2000 BPK-RI menyusun Rencana Pengembangan Kelembagaan (RPK) BPK-RI Tahun 2001-2003 yang mencakup antara lain berbagai penyempurnaan di dalam bidang : (a) organisasi terutama perwakilan; (b) manajemen pemeriksaan termasuk tata kerja dan jabatan fungsional; (c) sumber daya manusia, (d) teknologi informasi; (e) pendidikan dan latihan. Dengan terselenggaranya kegiatan sesuai dengan RPK BPK-RI Tahun 2000-2003, diharapkan BPK-RI dalam waktu yang tidak terlalu lama, semakin memenuhi harapan masyarakat, DPR dan MPR, serta dapat bekerja sesuai dengan praktik-praktik internasional terbaik dan standar-standar internasional dalam profesi audit.

Pelaksanaan pengembangan kelembagaan secara rinci adalah sebagai berikut ini.

1. Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pemeriksaan keuangan negara, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI yang ditetapkan dengan SK BPK Nomor 11/SK/K/1993 tanggal 24 Nopember 1993 telah disempurnakan dengan SK BPK Nomor 13/SK/K/1996 tanggal 3 Juni 1996.

Sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI telah mengalami tujuh kali perubahan, yaitu :

Pertama: dengan adanya perubahan struktur pemerintahan, pengoperasian Bank Indonesia (BI) secara mandiri dan terbentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Auditorat Utama Keuangan Negara (Auditama) II berdasarkan SK BPK Nomor 04/SK/I-VIII.3/5/2000 tanggal 30 Mei 2000.

Kedua: berkaitan dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam rangka mendukung efektivitas pemeriksaan keuangan negara di daerah, telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Auditama IV berdasarkan SK BPK Nomor 04/SK/I-VIII.3/5/2001 tanggal 18 Mei 2001.

Dengan penyempurnaan organisasi tersebut status tiga Sub Auditorat Perwakilan BPK-RI yang berkedudukan di Palembang, Denpasar, dan Banjarmasin (Eselon III.a) ditingkatkan menjadi perwakilan penuh (Eselon II.a), sehingga BPK-RI mempunyai tujuh Kantor Perwakilan BPK-RI di Medan, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Perwakilan Khusus di Jakarta.

Ketiga: untuk meningkatkan kinerja Bagian Pengolahan Data Elektronik di bidang teknologi informasi, telah dilakukan penyempurnaan organisasi di lingkungan (redefinisi) Bagian Pengolahan Data Elektronik dengan SK BPK Nomor 18/SK/I-VIII.3/6/2002 tanggal 7 Juni 2002. Dengan penyempurnaan organisasi tersebut Bagian Pengolahan Data Elektronik ditugasi untuk meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Staf BPK-RI dalam menggunakan komputer, baik dengan komputer tanpa jaringan (stand alone) maupun dengan komputer yang dihubungkan dengan jaringan. Bagian Pengolahan Data Elektronik membawahkan Sub Bagian Analisa dan Pemrograman, Sub Bagian Operasi, dan Sub Bagian Bantuan Pengguna.

Keempat: dalam rangka meningkatkan kinerja Staf Ahli pada BPK-RI telah dilakukan penyempurnaan nomenklatur dan uraian tugas Staf Ahli BPK-RI yang ditetapkan dengan SK BPK Nomor 09/SK/I-VIII.3/11/2003 tanggal 20 Nopember 2003. Dengan adanya

penyempurnaan tersebut nomenklatur Staf Ahli menjadi Staf Ahli I Bidang Sumber Daya Manusia, Staf Ahli II Bidang Pengembangan Sistem Pemeriksaan BUMN, Staf Ahli III Bidang APBN, Staf Ahli IV Bidang APBD dan Staf Ahli V Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Kelima: untuk meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan mengantisipasi perkembangan audit yang berlaku secara internasional, telah dilakukan penyempurnaan (redefinisi) terhadap tugas pokok dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Berdasarkan SK BPK Nomor 08a/SK/I-VIII.3/5/2004 tanggal 12 Mei 2004, tugas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai diperluas, yaitu menyusun program, melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai dan calon pegawai BPK-RI dan pegawai negeri lainnya, serta mengikuti, menyerap dan menerapkan standar-standar dan prosedur-prosedur audit yang berlaku secara internasional.

Selain itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan fungsi pengkajian perkembangan badan-badan internasional di bidang audit seperti INTOSAI, ASOSAI, IFAC, ICASA dan organisasi profesional di bidang audit, serta penyerapan, pengembangan dan penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat menciptakan staf BPK-RI yang memiliki standar profesional yang diakui dunia internasional seperti CISA, CFA, CFE, CMA, CBA dan CIA.

Keenam: dalam rangka mendukung efektivitas pemeriksaan keuangan negara di daerah telah dilakukan penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Auditama Keuangan Negara IV. Dengan adanya penyempurnaan organisasi tersebut Auditama Keuangan Negara IV yang semula membawahkan tujuh Kantor Perwakilan BPK-RI yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar menjadi delapan Kantor Perwakilan BPK-RI, dengan menambah satu Kantor

Perwakilan BPK-RI di Jayapura. Selain menambah satu Kantor Perwakilan, penyempurnaan organisasi tersebut termasuk mengembangkan Sub Auditorat dan Seksi di tujuh Kantor Perwakilan yang telah ada, sehingga jumlah jabatan struktural bertambah sebanyak 54 jabatan.

Penyempurnaan dan pengembangan organisasi Perwakilan BPK-RI tersebut telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/831/M.PAN/5/2004 tanggal 7 Mei 2004, dan ditetapkan dengan SK BPK-RI Nomor 09/SK/I-VIII.3/5/2004 tanggal 25 Mei 2004.

Ketujuh: Untuk memenuhi amanat Perubahan Ketiga UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, serta Rekomendasi MPR RI di dalam TAP MPR No. X/MPR/2001, BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI secara menyeluruh/totalitas. Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja tersebut telah ditetapkan dengan SK BPK-RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tanggal 23 Juli 2004.

Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPK-RI secara lengkap dimuat dalam **Lampiran IV**.

2. Tata Kerja

Tata Kerja BPK-RI diatur dalam Surat Keputusan BPK No. 05/SK/K/1995 tanggal 30 Mei 1995. Sebagai upaya peningkatan kegiatan pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Pelaksana BPK-RI, dalam periode 1998-2004 Badan telah berupaya menyempurnakan perangkat lunak pemeriksaan, perangkat lunak penunjang dan pendukung, jabatan fungsional auditor, memberikan masukan untuk penyusunan RUU tentang susunan dan kedudukan BPK-RI pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan, dan RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.1 Perangkat Lunak Pemeriksaan

Perangkat lunak pemeriksaan yang antara lain berupa Standar Audit Pemerintahan (SAP), Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), dan sebanyak 5 buah petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan 69 buah petunjuk teknis (Juknis) pemeriksaan telah dihimpun dan dikaji oleh Inspektorat Litbang, Inspektorat Utama Renalev bekerja sama dengan jajaran unsur Auditorat Utama Keuangan Negara, Staf Ahli, dan Biro-biro. Beberapa di antaranya telah disempurnakan dengan mengakomodasikan praktik-praktik internasional yang terbaik.

PMP Tahun 1995 telah disempurnakan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BPK-RI Nomor 37/SK/I/08/2002 tanggal 1 Agustus 2002, yang mulai diberlakukan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun Anggaran 2003. Sedangkan terhadap SAP Tahun 1995, saat ini sedang dilaksanakan evaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Sekjen No. 04/SK/II-VIII.3/1/2003 tanggal 23 Januari 2003 dan diperpanjang dua kali, yaitu dengan Surat Keputusan Sekjen No. 03/SK/II-VII.3/1/2004 tanggal 9 Januari

2004 dan Surat Keputusan Sekjen No. 10/SK/II-VII.3/7/2004 tanggal 8 Juli 2004. Penyempurnaan SAP tersebut mengacu pada Generally Accepted Government Auditing Standard (GAGAS) GAO-USA Tahun 2003 yang dijadikan acuan oleh INTOSAI dan ASOSAI.

Dengan diberlakukannya PMP 2002, maka perangkat lunak pemeriksaan yang mendukung pelaksanaan PMP 2002 perlu disusun atau disempurnakan, terutama perangkat lunak pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan (Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja).

Perangkat-perangkat lunak pemeriksaan yang telah dihimpun, dan perlu terus dikaji/dievaluasi, dan dituntaskan penyempurnaan/evaluasinya secara rinci dimuat dalam **Lampiran V**.

2.2 Perangkat Lunak Penunjang dan Pendukung

Perangkat lunak Penunjang dan Pendukung yang berupa Pedoman Administrasi Umum (PL VI.4) yaitu perangkat lunak untuk memberikan acuan dalam melaksanakan kegiatan kedinasan di lingkungan BPK-RI, utamanya untuk keseragaman dalam penyelenggaraan tata persuratan dan pengembangan serta pembangunan sistem informasi manajemen, telah dilaksanakan penyempurnaan dan telah disahkan dengan SK Sekretaris Jenderal BPK-RI No.03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tanggal 9 Januari 2004, dan untuk mempermudah pemahaman guna memperlancar pelaksanaan kegiatan akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara, telah disusun Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan BPK-RI dan telah ditetapkan dengan SK Sekjen No. 217/SK/VIII-VIII.3/11/2003, tanggal 7 November 2003.

Untuk mendukung tugas pemeriksaan di perwakilan, maka tata kerja pada kantor Perwakilan BPK-RI, telah disempurnakan dan ditetapkan SK Sekjen Nomor 09/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tanggal 14

Januari 2004 yang mengatur Pedoman dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan dan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang umum pada Kantor Perwakilan BPK.

2.3 Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan angka kreditnya di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Selanjutnya berdasarkan SK Sekretaris Jenderal BPK-RI No.113/SK/VIII-VIII.3/9/2000 tanggal 14 September 2000, ditetapkan Penyempurnaan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan BPK-RI, dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dan memperlancar pelaksanaannya. Dalam Keputusan MENPAN dan SK Sekjen tersebut, angka kredit bagi para auditor didasarkan atas proses kegiatan pemeriksaan, sehingga kurang mencerminkan kinerja auditor.

Sebagai upaya untuk menjamin pembinaan profesionalisme, karier, kepangkatan dan jabatan fungsional, serta memberikan motivasi kerja auditor di lingkungan BPK-RI, Badan mengarahkan agar angka kredit auditor didasarkan pada output yang dihasilkan oleh auditor. Oleh karena itu, BPK-RI saat ini sedang menyusun Konsep Penyempurnaan Keputusan MENPAN Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, yang secara khusus akan diberlakukan bagi auditor di lingkungan BPK-RI.

2.4 Penyusunan Paket RUU Bidang Keuangan Negara

Dalam upaya untuk mengganti Undang-undang lama mengenai Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berasal dari zaman kolonial, yaitu Indische Comptabiliteits Wet (ICW) Stbl. 1925

No. 448 (ditetapkan pertama kali Tahun 1864 dan mulai berlaku Tahun 1867), Indische Bedrijven Wet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445, Instructies en Verdere Bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320, oleh Pemerintah dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Pokok Keuangan Negara pada tahun 1999 dengan tugas menyusun RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, dan RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peran serta BPK-RI dalam menyiapkan sumbangan materi, membahas, dan sebagai nara sumber dalam pembahasan materi ketiga RUU Bidang Keuangan Negara tersebut oleh Pemerintah bersama DPR-RI, telah diuraikan secara rinci dalam Bab II.

2.5. Penyusunan Sumbangan RUU tentang Susunan dan Kedudukan BPK-RI

Dalam upaya mendukung peningkatan peran dan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G Undang Undang Dasar 1945 dan Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. X/MPR/2001 dan No. VI/MPR/2002, maka BPK-RI telah menyusun Sumbangan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan beserta naskah akademisnya yang disampaikan kepada Badan Legislasi DPR-RI sebagai bahan usulan (Hak Inisiatif) DPR-RI untuk diproses lebih lanjut.

Pada saat ini RUU tersebut telah selesai dibahas oleh Baleg DPR-RI, dan masih dalam proses untuk dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR-RI.

3. Sumber Daya Manusia

Pembenahan di bidang sumber daya manusia (SDM) diselenggarakan melalui penyempurnaan Sistem Penerimaan Pegawai Baru dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa (auditor), termasuk penempatan kembali tenaga pemeriksa yang berkemampuan yang sesuai dengan bidangnya ke unit operasional pemeriksaan yang dibarengi dengan pembinaannya yang mengarah pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri.

Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 menyadari bahwa kemandirian kelembagaan BPK-RI tidak akan ada artinya tanpa didukung dengan integritas para pelaksananya dalam menjalankan tugas pemeriksaan. Oleh karena itu, penyingkiran melalui berbagai model psikotes, baik bagi pegawai baru maupun pegawai yang akan dipromosikan secara terus-menerus dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pegawai-pegawai dengan kadar inteligensia, integritas dan independensi (3i) yang memadai.

Kekuatan pegawai pada Tahun Anggaran 1998/1999 pada awal Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004, berjumlah 2.533 orang telah bertambah sampai dengan bulan Maret 2004 menjadi 2.859 orang atau bertambah 12,87%.

Kegiatan penerimaan pegawai, mutasi dan promosi, serta pendidikan dan pelatihan pegawai yang telah dilaksanakan dalam periode 1998-2004 sebagai berikut ini.

3.1 Penyingkiran Pegawai

Sesuai dengan kebijakan BPK-RI, sampai dengan akhir tahun 2000 telah disediakan formasi untuk penambahan tenaga auditor yang berkualitas sebanyak 1.000 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 687 orang. Selanjutnya sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 juga telah disediakan formasi untuk penambahan auditor yang

berkualitas yang memiliki keahlian beragam seperti Akuntan (beregister), Manajemen, Hukum, Komputer (Teknologi Informasi). Proses penyaringannya dilaksanakan secara terbuka, sehingga diharapkan dapat diperoleh sebanyak mungkin calon pegawai yang berkualitas.

Dalam rangka mendapatkan pegawai yang tepat untuk diberikan suatu tugas/pekerjaan, pengadaan pegawai dilakukan melalui berbagai tes, diantaranya adalah tes psikologi dan tes psikiatri.

Aspek-aspek yang dinilai dalam tes psikologi rekrutmen calon pegawai BPK-RI yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, adalah yang berikut :

- a. *Kemampuan Intelektif* adalah kemampuan menangkap inti persoalan, tanggap, ketajaman menganalisa persoalan, memilah dan menemukan kaitan elemen-elemen di dalam persoalan/masalah.
- b. *Daya Tahan Kerja* adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan keterbatasan waktu, lokasi yang jauh dan lingkungan yang berbeda, harus tetap berdasarkan pada aturan dan justru tidak boleh bertindak kreatif.
- c. *Kemampuan Komunikasi* adalah kemampuan untuk mendengar aktif, menyampaikan kepada orang lain, menanyai dan menggali informasi, bernegosiasi dan menuliskan/menyampaikan laporan dengan sikap tanggap/bijaksana (*tactful*).
- d. *Kemampuan Pengambilan Keputusan* adalah kepercayaan diri, keberanian berisiko, keberanian menghadapi penolakan, dan ketidakpastian untuk mengambil keputusan yang dianggap benar.
- e. *Keterampilan Bekerja Sama* adalah keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, bekerja secara tim, dan menyesuaikan diri dengan orang-orang yang berbeda.

- f. *Kestabilan Emosi* adalah kematangan emosi menghadapi reaksi positif maupun negatif dari orang lain atau konflik, kehati-hatian dalam menyikapi kerahasiaan, keterbukaan diri untuk mencari kebenaran.
- g. *Komitmen Pribadi* adalah keikatan pribadi yang tinggi terhadap profesi dibanding terhadap organisasi, sehingga tersedia berkorban demi menjaga nama baik profesinya.
- h. *Integritas Pribadi* adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, bersikap tegas, mandiri dan kesediaan untuk teguh pada prinsip, serta menyatakan apa adanya terhadap apa yang diyakini sebagai benar.

Aspek-aspek yang dinilai dalam tes psikologi yang diselenggarakan oleh Dr. Eliyati D. Rosadi, SpKJ dkk, adalah yang berikut :

- a. *Kecerdasan*,
 - *Intelegensi Umum* yaitu derajat kemampuan individu secara potensial dalam mengolah masalah yang dihadapi, kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan secara tepat dan cepat.
 - *Daya Tangkap* yaitu kemampuan menangkap dan mengolah masalah secara cepat dan tepat.
 - *Logika Berfikir* yaitu proses berpikir yang teratur, dalam membuat kesimpulan berdasar pengalaman pribadi.
 - *Kemampuan Komunikasi* yaitu kemampuan memahami informasi dari luar/pihak lain dan menyampaikan informasi dengan tata bahasa yang terarah sesuai dengan topik.
- b. *Sikap Kerja*, yang meliputi ketekunan, ketelitian, ketahanan kerja, dan motivasi untuk berprestasi.
 - *Ketekunan* yaitu ketahanan melakukan aktifitas/tugas dengan memusatkan perhatian secara mendalam dengan sikap sabar

dan telaten, tidak mudah merasa jenuh dan terpengaruh gangguan lingkungan.

- *Ketelitian* yaitu usaha untuk melakukan tugas setepat mungkin, tidak banyak melakukan kesalahan.
- *Ketahanan* yaitu kemampuan mempertahankan stabilitas kinerja walaupun ada tekanan pada berbagai aspek kerja.
- *Hasrat Berprestasi* yaitu dorongan diri seseorang untuk meraih hasil yang lebih baik untuk mencapai sasaran kerja yang ditentukan.

c. *Kepribadian*

- *Kematangan Pribadi* yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri/emosi, tidak mudah terpengaruh situasi, dan bertindak rasional.
- *Pengambilan Keputusan* yaitu kemampuan individu untuk berani mengambil pilihan alternatif, menentukan sikap dengan prinsip yang dianggap benar dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- *Integritas Diri* yaitu kemampuan untuk berani mempertimbangkan dan menetapkan sendiri sikap dan tindakan yang harus dilakukan, tanpa menggantungkan pendapat atau bantuan pihak lain.
- *Potensi Kepemimpinan* yaitu kemampuan keterampilan dan dorongan dari dalam untuk menggalang, mempengaruhi, mengarahkan dan mengelola orang lain untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan kerja.
- *Kerjasama* yaitu kemampuan dan kesediaan individu untuk membantu dan menjalin hubungan dalam kelompok kerja, baik dengan sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga penyelenggara psikotes tersebut melaksanakan tes yang meliputi aspek yang sama.

Metode penilaian, masing-masing aspek tersebut di atas diberi nilai sebagai berikut :

a. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

- BS = Baik Sekali
- B = Baik
- C = Cukup
- PD = Perlu Dipertimbangkan

b. dr. Eliyati D. Rosadi, SpKJ

- SB = Sangat Baik
- B = Baik
- C = Cukup
- S = Sedang
- K = Kurang

Dari hasil penilaian seperti terlihat pada metode di atas, kedua lembaga penyelenggara psikotes tersebut sama-sama memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. A = *Disarankan* : yang bersangkutan disarankan untuk diangkat menjadi pagawai BPK-RI (auditor).
- b. B = *Dipertimbangkan* : yang bersangkutan dapat dipertimbangkan menjadi pegawai BPK-RI (auditor).
- c. C = *Tidak Disarankan* menjadi pegawai BPK-RI.

Bila dibandingkan ketiga rekomendasi di atas dapat diartikan bahwa “A” lebih baik dari “B”, dan “B” lebih baik dari “C”.

Data mengenai calon pegawai yang telah mengikuti tes psikologi dan tes psikiatri sejak TA 1999 s.d. TA 2004 adalah sebagai berikut ini.

Tahun Anggaran	Tes Psikologi			Tes Psikiatri			Pelaksana Tes
	Jumlah Yang Ditest	Diterima	%	Jumlah Yang Ditest	Jujur	%	
1999/2000	320	94	29,38	-	-	-	Fakultas Psikologi Univ. Indonesia
2000	-	-	-	-	-	-	Fakultas Psikologi Univ. Indonesia
2001	-	-	-	-	-	-	Fakultas Psikologi Univ. Indonesia
2002	282	124	43,97	282	124	43,97	dr. Eliyati
2003	285	156	54,74	285	156	54,74	dr. Eliyati
2004	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	887	374	42,16	567	280	49,38	

Catatan : yang diterima adalah yang memperoleh rekomendasi “A = disarankan dan atau jujur”

Data mengenai calon pegawai BPK-RI (auditor) yang telah lulus mengikuti tes psikologi dan telah lulus mengikuti tes psikiatri, dengan memperoleh rekomendasi “A : *Disarankan*” menurut bidang keahliannya, adalah yang berikut ini.

Tahun	Keahlian (sarjana)						Jumlah
	Akun-tansi	Mana-jemen	Hukum	Kompu-ter	Dokter	Lainnya	
1999/2000	55	4	11	1	-	23	94
2000	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-
2002	56	30	28	10	-	-	124
2003	136	-	13	6	1	-	156
2004	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	247	34	52	17	1	23	374

Catatan : Capeg penerimaan TA 1999/2000 lulus tes psikologi
Capeg penerimaan TA 2002 dan TA 2003 lulus tes psikologi dan tes psikiatri

3.2 Mutasi dan Promosi

Dalam rangka mencapai kelancaran pelaksanaan tugas pokok telah dilaksanakan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan BPK-RI secara berkesinambungan melalui seleksi yang ketat, diantaranya melalui tes psikologi dan tes psikiatri.

Dari hasil penilaian seperti terlihat pada metode yang dimuat pada Butir 3.1 di atas, kedua lembaga penyelenggara psikotes tersebut dalam rangka mutasi dan promosi pejabat BPK-RI, sama-sama memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. A = *Disarankan* : yang bersangkutan disarankan untuk dipromosikan ke jabatan struktural yang lebih tinggi.
- b. B = *Dipertimbangkan* : yang bersangkutan belum siap untuk dipromosikan. Agar yang bersangkutan siap, maka ia harus mendapatkan tambahan keterampilan tertentu (Perencanaan dan Pengorganisasian, Pengambilan Keputusan, Kepemimpinan, dan Kerja Sama), tergantung pada aspek yang mana diantara keempat aspek tersebut pegawai yang bersangkutan dinilai masih lemah. Tambahan keterampilan diberikan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan dapat diberikan sebelum atau setelah seseorang dipromosikan.
- c. C = *Tidak Disarankan/Kurang Disarankan* : yang bersangkutan tidak sesuai untuk mengemban jabatan struktural. Ia lebih sesuai untuk tugas-tugas fungsional atau tugas-tugas di unit supporting namun bukan pada jabatan struktural.

Bila dibandingkan ketiga rekomendasi di atas dapat diartikan bahwa “A” lebih baik dari “B”, dan “B” lebih baik dari “C”.

Data mengenai pejabat struktural dan pegawai yang belum menduduki jabatan struktural yang telah mengikuti tes psikologi dan tes psikiatri, dan yang telah memperoleh rekomendasi “A :

Disarankan dan atau jujur”, sejak TA 1999/2000 s.d. TA 2004 adalah sebagai berikut ini.

Periode	Pejabat/ Peg. Non Struktural	Tes Psikologi					Tes Psikiatri			Pelaksana
		Jumlah Yang Ditest	Disaran kan	%	Dipertim- bangan	Tidak Disaran- kan	Jumlah Yang Dites	Jujur	%	
1999 - 2001	Eselon I	5	3	60,00	2	0	-	-	-	Fakultas Psikologi Univ Indonesia
	Eselon II	32	24	75,00	5	3	-	-	-	
	Eselon III	80	54	67,50	13	13	-	-	-	
	Eselon IV	145	63	43,45	35	47	-	-	-	
		262	144	54,96	55	63	-	-	-	sda
	Peg. Non Struktural	72	7	9,86	32	33	-	-	-	sda
	Sub Jum- lah (1)	334	151	45,21	87	95	-	-	-	sda
2002 - 2004	Eselon I	1	1	100,00	-	-	2	2	100,00	dr. Eliyati
	Eselon II	5	4	80,00	1	-	32	29	90,63	sda
	Eselon III	25	16	64,00	8	1	80	62	77,50	sda
	Eselon IV	98	27	27,55	45	26	164	129	78,66	sda
		129 *)	48	37,21	54	27	278	222	79,86	sda
	Peg. Non Struktural	242 **)	90	37,19	128	24	185	156	84,32	sda
	Sub Jum- lah (2)	371	138	37,20	182	51	463	378	81,64	sda
a. Jumlah Pejabat Struktural	391	192	49,10	109	90	278	222	79,86		
b. Jumlah Pegawai Non Struktural	314	97	30,89	160	57	185	156	84,32		
	Jumlah (a) + (b)	705	289	40,99	269	147	463	378	81,64	

Keterangan : *) : dari 129 pejabat yang mengikuti tes psikologi, terdapat 16 pejabat di antaranya yang mengulang.

**) : dari 242 pegawai non struktural yang mengikuti tes psikologi, terdapat 106 pegawai yang mengulang

Proses promosi dan mutasi jabatan struktural sampai dengan eselon II dilakukan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah mendapat pertimbangan Badan. Sebagai upaya untuk menyempurnakan prosedur promosi dan mutasi jabatan struktural, telah disusun Tata Kerja Baperjakat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan SK. Nomor 114/SK/VIII-VIII.3/7/2003 tanggal 7 Juli 2003.

3.3 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai

Program pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) mencakup DIKLAT bagi tenaga auditor, staf teknis, tenaga pimpinan ("manajer"), dan tenaga berpotensi pemimpin melalui pendidikan lanjutan di Indonesia dan di luar negeri, DIKLAT Khusus di dalam dan di luar negeri, dan DIKLAT "Penyegaran" mengenai Akuntansi dan Auditing di lingkungan BPK-RI.

Kegiatan DIKLAT BPK-RI dapat digolongkan dalam kegiatan DIKLAT internal dan kegiatan DIKLAT eksternal. Kegiatan DIKLAT internal, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus PUSDIKLAT Pegawai, meliputi antara lain penyusunan program DIKLAT, penyelenggaraan DIKLAT pegawai serta evaluasi dan ceramah, seminar serta kewidyaiswaraan, sedang kegiatan DIKLAT eksternal yaitu kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus PUSDIKLAT Pegawai dalam rangka kerja sama dengan lembaga/instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jenis DIKLAT pegawai pada Pelaksana BPK-RI dapat digolongkan sebagai berikut DIKLAT Pra Jabatan (DIKLAT Pra Jabatan Tingkat II dan DIKLAT Pra Jabatan Tingkat III), dan DIKLAT Dalam Jabatan (DIKLAT Struktural/Kepemimpinan, DIKLAT Fungsional Auditor dan DIKLAT Teknis).

Selama periode 1998-2004 PUSDIKLAT Pegawai telah mengirimkan para auditor/pegawai untuk mengikuti Program Pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang dibiayai dari Bagian Proyek Modernisasi Audit BPK-RI atau dari sponsor lain di luar negeri sebagai berikut :

Dalam Negeri

Program D-IV di STAN; Program S-1 di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya

dan ITB, dan Program S-2 di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.

Luar Negeri

Program S-2 pada berbagai universitas di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis dan Jepang, dan Program S-3 pada berbagai universitas di Amerika Serikat dan Inggris, serta DIKLAT singkat/Short Course Luar Negeri di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Belgia, Australia, Philipina, India, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pelaksanaan penyelenggaraan DIKLAT dan pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan umum dalam periode 1998-2004 dimuat dalam daftar berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN						
		98/99	99/00	2000	2001	2002	2003	2004
I.	Diklat Pra Jabatan							
1.	Diklat Pra Jabatan Tk. II		158	46	-	-	21	
2.	Diklat Pra Jabatan Tk. III		-	-	-	-	42	
3.	Diklat ke-BPK-an		237	-	-	-	150	
II.	Diklat Dalam Jabatan							
1.	Diklat Struktural/ Kepemimpinan :							
a.	KSA/KRA Lemhanas	1	-	2	1	-	1	
b.	Diklat Kepemimpinan Tingkat I/SPATI	1	1	1	1	2	-	
c.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II/SPAMEN	6	9	3	9	8	24	-
d.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/SPAMA	38	40	-	-	1	-	-
e.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ADUM.	60	1	40	35	34	2	-
2.	Diklat Fungsional Auditor :							
a.	Diklat Auditor Trampil	43	134	-	-	-	-	-
b.	Diklat Auditor Ahli	248	95	139	205	43	167	-
c.	Sertifikasi Peran (Penyesuaian)	1323	37	-	-	-	-	-

No	URAIAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN						
		98/99	99/00	2000	2001	2002	2003	2004
d.	Diklat Ketua Tim Yuniior	59	34	32	26	156	151	-
3.	Diklat Teknis :							
a.	Audit Investigasi	-	-	-	23	-	80	-
b.	Bidang Audit lainnya	104	659	797	1095	2591	3153	393
c.	Bidang Jangkung	245	314	169	123	449	1186	188
d.	Bidang Lain-lain	59	46	128	201	1216	562	-
e.	Sosialisasi Petunjuk Pemeriksaan Dokumen Tanggung Jawab Keuangan Negara	-	1162	-	-	-	-	-
f.	Diskusi Panel JFA	-	1275	-	-	-	-	-
III	Pendidikan Umum (Degree)							
1.	Dalam Negeri :							
a.	Program D-IV	-	8	1	4	-	-	-
b.	Program S-1	63	32	-	-	-	-	-
c.	Program S-2	20	38	-	2	-	72	-
2.	Luar Negeri :							
a.	Program S-2	15	28	-	18	14	53	-
b.	Program S-3	2	1	-	-	-	1	-
IV	Diklat-Diklat Singkat/Short Course Luar Negeri (Non Degree) :							
1.	Masa 6 s.d 12 bulan	12	7	6	2	1	7	-
2.	Masa di bawah 6 bulan	40	22	20	35	21	2	-
J u m l a h		2.339	3.943	1.338	1.780	4.536	5.673	581

Selain melakukan kegiatan internal, PUSDIKLAT Pegawai juga telah mengadakan kerja sama kediklatan dengan lembaga/instansi luar, berupa penyediaan bantuan tenaga pengajar untuk mengajar pada DIKLAT instansi lain, baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perkembangan pegawai Pelaksana BPK-RI berdasarkan klasifikasi pendidikan D3, S1, dan S2 berbagai jurusan sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut ini.

No.	Kualifikasi Pendidikan/Bidang Keahlian	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	2003	2004
I.	DIPLOMA - 3							
1.1	Administrasi (Sospol)	28	25	20	21	15	17	11
1.2	Akuntansi	179	55	102	110	77	80	54
1.3	Ekonomi + Kebendaharaan (Keuangan)	67	80	64	65	59	65	24
1.4	H u k u m	5	4	3	3	2	1	1
1.5	T e k n i k	3	3	3	4	2	3	2
1.6	Kepegawaian	1	1	0	1	0	1	0
1.7	Kearsipan	2	2	0	5	0	2	0
1.8	Bahasa Inggris	2	2	0	5	0	4	0
1.9	Komputer	6	8	7	8	7	7	4
1.10	Lainnya	24	28	42	16	28	10	18
Sub Jumlah (1)		317	208	241	238	190	190	114
II	SARJANA STRATA I							
2.1	Administrasi (Sospol)	161	155	161	153	139	177	171
2.2	Akuntansi	685	788	742	791	761	845	863
2.3	Ekonomi + Kebendaharaan (Keuangan)	286	322	302	312	311	338	315
2.4	H u k u m	143	150	154	146	135	159	150
2.5	T e k n i k	30	42	41	45	40	39	35
2.6	Kedokteran	1	1	0	0	0	2	0
2.7	Kepegawaian	0	0	0	0	0	8	0
2.8	Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Bahasa Inggris	0	0	0	1	0	2	0
2.10	Komputer	12	13	13	12	16	27	23
2.11	Lainnya	75	82	78	65	73	25	225
Sub Jumlah (2)		1.393	1.553	1.491	1.525	1.475	1.622	1.782
III	SARJANA STRATA II							
3.1	Administrasi (Sospol)	10	19	7	15	16	24	17
3.2	Akuntansi	9	18	8	17	26	30	45
3.3	Ekonomi + Kebendaharaan (Keuangan)	44	56	41	120	146	162	210
3.4	H u k u m	7	7	5	2	3	3	7

No.	Kualifikasi Pendidikan/Bidang Keahlian	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	2003	2004
	3.5 Teknik	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Kedokteran	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0
	3.8 Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0
	3.9 Bahasa Inggris	0	0	0	0	0	0	0
	3.10 Komputer	0	0	0	1	2	2	9
	3.11 Lainnya	2	6	1	1	11	6	15
	Sub Jumlah (3)	72	106	62	156	204	227	303
	Jumlah (1) + (2) + (3)	1.782	1.867	1.794	1.919	1.869	2.039	2.149

4. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang bebas dan mandiri oleh BPK-RI sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945, oleh Pimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 telah terus diusahakan peningkatan anggaran BPK-RI dalam jumlah yang memadai, khususnya biaya pemeriksaan dan biaya pengadaan prasarana dan sarana (termasuk komputer), sehingga mampu mendukung peningkatan pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Perkembangan anggaran BPK-RI sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004 adalah sebagai dimuat dalam daftar berikut :

(dalam juta Rupiah)

No	Jenis Anggaran	Tahun Anggaran						
		1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	2003	2004
1	Belanja Rutin	57.263,45	63.974,02	55.980,95	83.120,14	89.790,41	110.896,61	110.282,02
2	SKOR	-	-	-	9.425,58	14.112,62	14.618,00	43.959,38
3	Belanja Pembangunan	16.779,77	19.622,73	19.615,82	26.602,75	44.835,44	69.523,03	79.845,42

No	Jenis Anggaran	Tahun Anggaran						
		1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002	2003	2004
4	Pinjaman/hibah luar negeri *)	16.609,74	11.268,95	9.287,60	9.775,97	28.228,65	32.753,48	74.048,00
Jumlah		90.652,96	94.865,57	84.884,37	128.924,44	176.967,12	227.791,12	308.134,82

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran rutin mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan Gaji, Tunjangan Jabatan Tertentu BPK-RI, dan Tunjangan Kegiatan, untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai BPK-RI yang dibayarkan bersama-sama gaji. Pemberian tunjangan tersebut dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan, terakhir kenaikan tunjangan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE.DJA-188/A/2002 tanggal 24 Oktober 2002.

Selain anggaran rutin yang tertuang dalam DIK BPK-RI juga menerima anggaran yang bersumber dari Surat Keputusan Otorisasi Rutin (SKOR) Menteri Keuangan untuk biaya pemeriksaan berdasarkan permintaan DPR- RI.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pemeriksaan setempat, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan lainnya (seperti pemeriksaan lingkungan dan pemeriksaan investigasi) adalah sebagai berikut.

Tahun Anggaran	Anggaran Untuk Pemeriksaan Setempat (dalam juta Rupiah)		
	DIK/DIP	SKOR	Jumlah
1998/1999	6.796,85	-	6.796,85
1999/2000	5.295,88	-	5.295,88
2000	4.783,41	-	4.783,41
2001	7.008,83	9.425,58	16.434,41
2002	8.354,32	14.112,61	22.466,94
2003	5.618,50	14.618,00	20.236,50
2004	4.610,61	25.819,14	30.429,75

5. Teknologi Informasi

Selama Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004, pengembangan teknologi informasi (TI) mendapat perhatian besar. Perhatian Badan dalam pengembangan teknologi informasi diwujudkan dalam Rencana Pengembangan Kelembagaan (RPK) BPK-RI Tahun 2001-2003 yang memuat bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagai salah satu prioritas pengembangan.

Pengembangan sistem informasi audit di BPK-RI mencakup peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak meliputi aplikasi dasar (MS Offices), aplikasi penggunaan file bersama (File Sharing); aplikasi berorientasi dan spesifik audit, aplikasi komunikasi dan arsip, aplikasi audit, dan aplikasi kegiatan pendukung (kepegawaian, keuangan, DIKLAT), termasuk pengembangan jaringan informasi *Local Area Network (LAN)* dan *Wide Area Network (WAN)* antar satuan kerja di Pusat, antara Pusat dan Perwakilan, serta antar Perwakilan untuk mendukung peningkatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan/pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang lebih bermutu, tepat, akurat, dan cepat.

Berdasarkan RPK BPK-RI Tahun 2001-2003, pengembangan TI dilakukan dengan mengembangkan organisasi, infrastruktur, dan aplikasinya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Kegiatan pengembangan yang telah dilakukan BPK-RI adalah sebagai berikut:

5.1 Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi bidang TI dilakukan dengan meredefinisi fungsi dan tugas Bagian Pengolahan Data Elektronik (Bagian PDE). Redefinisi fungsi dan tugas Bagian PDE dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan BPK-RI Nomor 18/SK/I.VIII.3/6/2002

tanggal 7 Juni 2002, memuat antara lain bahwa Bagian PDE mempunyai tugas meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Staf BPK-RI dalam menggunakan komputer, baik dengan komputer yang tanpa jaringan (stand-alone) maupun komputer yang terhubung dengan jaringan.

5.2 Pengembangan Infrastruktur

Di awal kepemimpinan Badan Periode 1998-2004, infrastruktur teknologi informasi yang ada berupa komputer stand-alone dan jaringan lokal secara terbatas. Jaringan komputer masih terbatas pada Pimpinan, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan satuan kerja tertentu yang terkait dengan penerapan aplikasi kepegawaian (SDM), penggajian, perpustakaan, persuratan, dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan. Jumlah komputer untuk mendukung jaringan sebanyak 50 komputer meja (“desktop”). Komputer stand-alone untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja sebanyak 231 desktop. Mesin cetak (“printer”) untuk mendukung penyelesaian laporan sebanyak 89 unit printer dot matrik dan sebanyak 60 unit printer laser jet. Penyediaan sarana TI di Perwakilan BPK-RI (belum termasuk Perwakilan II BPK-RI di Palembang, Perwakilan IV BPK-RI di Denpasar, dan Perwakilan V BPK-RI di Banjarmasin), masih terbatas pada penyediaan komputer stand-alone. Jumlah komputer di Perwakilan BPK-RI sebanyak 77 unit desktop. Sementara jumlah printer yang tersedia sebanyak 46 unit printer dot metrik dan 14 unit printer laser jet.

Penyediaan infrastruktur dalam rangka pengembangan teknologi informasi dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :

Tahap I; pengadaan perangkat TI yang berupa komputer desktop, komputer bawaan (“notebook”), dan printer serta jaringan lokal yang menghubungkan antara Pimpinan BPK-RI dan seluruh satuan kerja

di lingkungan Auditama Keuangan Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal (*Local Area Network/LAN*), dilaksanakan pada TA 2002. Pada tahap ini, pengembangan teknologi informasi di Perwakilan BPK-RI mulai dilaksanakan dengan pembangunan jaringan internet melalui Internet Service Provider (ISP) dari Balai Ipteknet dan ISP Wasantara.

Tahap II; pengadaan perangkat TI yang juga berupa komputer desktop, notebook, printer, pengembangan jaringan di kantor Pusat, dan pembangunan jaringan antara Kantor Pusat, Perwakilan, dan PUSDIKLAT pada TA 2003 (*Wide Area Network/WAN*). Jaringan antar kantor dibangun untuk menyediakan sarana komunikasi elektronik antara Pimpinan BPK-RI dan seluruh satuan kerja di lingkungan BPK-RI, termasuk satuan kerja penunjang dan pendukung dan satuan kerja di Perwakilan serta PUSDIKLAT BPK-RI. Komunikasi antar Kantor Pusat dan Perwakilan BPK-RI menggunakan teknologi Frame Relay.

Dewasa ini telah tersedia 3 buah komputer meja (“desktop”), 1 buah mesin cetak (“printer”) dan 4 buah komputer bawaan (“laptop”) di setiap ruangan kerja Kepala Seksi ; 1 buah dekstop, 1 buah printer, dan 1 buah laptop di setiap ruangan kerja Kepala Sub auditorat ; 1 buah dekstop, 1 buah printer, dan 1 buah laptop di setiap ruangan kerja Kepala Auditorat ; serta 1 buah dekstop, 1 buah printer, 1 buah laptop dan 1 buah mesin perekam (“scanner”) di setiap ruangan kerja Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama).

Penyediaan sarana TI di masing-masing Auditama dan masing-masing Perwakilan adalah sebagai berikut:

No.	Auditama/Perwakilan	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop **)	Printer	Scanner	Kamera Digital
1.	Auditama I	67	68	25	1	**)
2.	Auditama II	95	65	37	1	**)

No.	Auditama/Perwakilan	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop **)	Printer	Scanner	Kamera Digital
3.	Auditama III	59	54	25	1	**)
4.	Auditama IV	1	1	1	1	**)
	4.1 Perwakilan I di Medan	51	25	46	2	4
	4.2 Perwakilan II di Palembang	46	23	29	2	4
	4.3 Perwakilan III di Jakarta	24	19	11	-	-
	4.4 Perwakilan IV di Yogyakarta	61	23	38	2	4
	4.5 Perwakilan V di Denpasar	38	22	34	2	4
	4.6 Perwakilan VI di Banjarmasin	24	21	18	2	4
	4.7 Perwakilan VII di Makassar	37	25	38	2	4
	4.8 Perwakilan VIII di Jayapura *)	1	-	1	-	-
	Sub Jumlah (4)	283	159	216	16	24
5.	Auditama V	107	76	25	1	**)
	Jumlah (1) s.d. (5)	611	422	328	17	24

Catatan : *) : Perwakilan VIII Jayapura baru dibentuk pada tanggal 25 Mei 2004, dan Pejabat yang dilantik baru Kepala Perwakilan VIII pada tanggal 24 Mei 2004.

**): dimanfaatkan dengan Sistem Pinjam-Kembali (Sistem Third Party Loan)

Sedangkan sarana TI yang telah terpasang di ruangan Pimpinan BPK-RI, Sekretariat Jenderal, dan di Irtama Wasinsus dan Irtama Renalev, adalah sebagai berikut :

No.	Unit Utama/Biro/Pusat	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop	Printer	Scanner	Kamera Digital
1.	Pimpinan BPK-RI	7	-	7	-	-
2.	Sekretariat Jenderal	2	-	2	1	-
	2.1 Biro Kepegawaian	16	-	7	-	-
	2.2 Biro Keuangan	13	-	10	-	-
	2.3 Biro Kumdang	11	-	4	-	-
	2.4 Biro Pengolahan Data	59	-	20	6	-
	2.5 Biro Organisasi dan Tata Laksana	6	-	5	-	-
	2.6 Biro Umum	-	-	-	-	-
	a. Dalam pemakaian	15	-	6	-	-
	b. Persediaan (untuk dipinjamkan)	-	56	-	-	77
	c. Persediaan (belum didistribusi)	69	-	28	2	-

No.	Unit Utama/Biro/Pusat	Jumlah Sarana TI Terpasang				
		Desktop	Laptop	Printer	Scanner	Kamera Digital
	2.7 PUSDIKLAT Pegawai BPK-RI	43	-	3	-	-
	Sub Jumlah (2)	234	56	85	9	77
3.	Irtama Wasinsus	51	-	17	1	-
4.	Irtama Renalev	50	-	15	1	-
5.	Staf Ahli	2	-	1	-	-
	Jumlah (1) s.d. (4)	344	56	121	11	77

Penyediaan sarana berupa laptop dan kamera digital dilakukan dengan sistem pinjam kembali (Sistem Third Party Loan). Pelaksanaan peminjaman disesuaikan dengan kebutuhan Tim pada saat melakukan pemeriksaan. Sebagai penyelenggaran penyediaan peminjaman peralatan TI adalah Biro Umum untuk kantor pusat dan Sekretariat Perwakilan untuk kantor perwakilan. Secara keseluruhan penyediaan sarana TI di Kantor Pusat dan di Perwakilan adalah 955 buah desktop, 478 buah laptop, 449 buah printer, 28 buah scanner, 101 buah kamera digital, dan 18 buah alat peraga.

Peralatan yang berupa desktop yang ditempatkan pada masing-masing ruangan kerja pejabat struktural : Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang (eselon IVa); Kepala Sub Auditorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang (eselon IIIa); Kepala Biro, Kepala Auditorat, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan, Inspektur (eselon IIa); Staf Ahli (eselon I-b); Irtama, Tortama, Sekjen (eselon I-a), dan Pimpinan BPK-RI telah dihubungkan satu sama lain melalui jaringan lokal (Local Area Network/LAN) dan dengan keseluruhan kantor BPK melalui jaringan antar kota dengan Frame Relay.

Perangkat lunak yang digunakan adalah Windows 2000 Profesional untuk Operating System, Symantec 8.5 untuk Anti Virus, Sys Mgmt CAL 2.0 untuk Remote Access Client, Office 2000 untuk

Archive Software, VB 8.5 untuk Productivity, IIS untuk Browser, ACL 8.5 untuk Audit Software.

5.3 Pengembangan Aplikasi TI dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Dalam menunjang kebutuhan pemeriksaan, aplikasi yang telah dikembangkan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu aplikasi dasar, aplikasi berorientasi pemeriksaan, aplikasi komunikasi, dan aplikasi berorientasi kegiatan penunjang dan pendukung.

Aplikasi dasar meliputi aplikasi untuk melaksanakan pengetikan naskah, menyusun tabel, dan membuat bahan presentasi dengan menggunakan perangkat lunak MS Office.

Aplikasi berorientasi pemeriksaan meliputi: aplikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer (ACL, MS Acces dan MS Excel); sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pemeriksaan; sistem informasi dokumen referensi pemeriksaan; serta aplikasi File Sharing.

Aplikasi komunikasi meliputi aplikasi E-mail dan internet, sedangkan aplikasi berorientasi kegiatan penunjang dan pendukung meliputi aplikasi kepegawaian, penggajian, keuangan, persuratan, perpustakaan dan pelatihan.

Sarana komunikasi (untuk E-Mail atau File Sharing) menjangkau pada seluruh satuan kerja sampai dengan eselon IV Kantor Pusat dan Perwakilan. Internet menjangkau sampai dengan eselon II dengan jumlah bandwidth 256 KBPS.

Dalam upaya modernisasi pelaksanaan tugas pemeriksaan, di samping disediakan mesin, baik dalam jaringan Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) yang dilengkapi “dekstop” (komputer meja) maupun “notebook” (komputer pangku) dalam jumlah yang

terus meningkat, juga terus dikembangkan aplikasinya di bidang pemeriksaan seperti : ACL (CAATS), MS Access dan MS Excel.

6. Konsulen Hukum

Mengingat bahwa di masa depan keterlibatan BPK-RI dalam kasus-kasus korupsi dan lain-lain penyimpangan akan meningkat, oleh Kepemimpinan BPK-RI Periode 1998-2004 telah dilakukan upaya agar setiap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum acaranya.

Untuk keperluan tersebut telah dibentuk atau dikembangkan jenis keahlian Konsulen Hukum. Selanjutnya berdasarkan SK BPK-RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/10/2001 tanggal 10 Oktober 2001 dibentuk Tim Konsulen Hukum (TKH) di Pusat dan Perwakilan yang bertugas melakukan telaahan dan memberikan pendapat hukum atas hasil pemeriksaan, memberikan konsultasi hukum kepada auditor, serta melakukan paparan kasus atas hasil pemeriksaan. Jumlah anggota TKH Pusat sebanyak 13 orang Sarjana Hukum dan dibantu oleh 6 orang tenaga staf.

Sebagai tindak lanjut keputusan BPK-RI tersebut, Sekretaris Jenderal BPK-RI telah membentuk TKH pada masing-masing Perwakilan, yaitu:

No.	TKH Pada Perwakilan	SK Sekjen No. / Tanggal	Jumlah Anggota TKH	Staf
1.	Pwk, I di Medan	No. 47a/SK/VIII-VIII.3/3/2003 Tanggal 10 Maret 2003	3	-
2.	Pwk. II di Palembang	No. 06/SK/XIV.2/2/2004 Tanggal 3 Februari 2004	7	-
3.	Pwk. III di Yogyakarta	No. 46a/SK/VIII-VIII.3/3/2003 Tanggal 10 Maret 2003	5	1
4.	Pwk. IV di Denpasar	No. 07/SK/XIV.4/09/2003 Tanggal September 2003	6	-

No.	TKH Pada Perwakilan	SK Sekjen No. / Tanggal	Jumlah Anggota TKH	Staf
5.	Pwk. V di Banjarmasin	No. 107/SK/VIII-VIII.3/4/2004 Tanggal 26 April 2004	6	2
6.	Pwk. VI di Makassar	No. 45a/SK/VIII-VIII.3/3/2003 Tanggal 10 Maret 2003	4	1
Jumlah			31	4

Hasil pelaksanaan tugas Tim Konsulen Hukum, terutama yang berupa hasil telaahan dan pemberian pendapat hukum, sejak Oktober 2001 sampai dengan Maret 2004 meliputi 356 buah, baik yang berupa hasil telaahan dan pendapat hukum atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) maupun Non LHP.

Pemberian konsultasi hukum kepada satuan kerja Auditama dan Auditor telah dilakukan untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan, antara lain kepada :

- a. Tim Auditama KN I, berkaitan dengan pemeriksaan atas Pendapatan dan Biaya Operasional/Non Operasional serta Pos-pos Tertentu Laporan Keuangan TA 2001 dan 2002 pada Kantor Pusat Perjan TVRI di Jakarta.
- b. Tim Auditama KN II, berkaitan dengan pemeriksaan atas Kinerja Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- c. Tim Auditama KN III, berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
- d. Tim Auditama KN IV, atas Hasil Pemeriksaan atas APBD Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pandeglang.
- e. Tim Auditama KN V, atas Hasil Pemeriksaan Kredit Macet pada Bank-bank milik Negara/Pemerintah.

Sampai dengan akhir bulan Februari 2004, sebanyak 10 hasil telaahan hukum terhadap 10 HP BPK-RI, telah ditindaklanjuti oleh BPK-RI dengan menyampaikannya kepada Kejaksaan Agung, serta 3 buah telaahan hukum atas penolakan pemeriksaan telah disampaikan kepada Kepolisian Negara RI.

Kegiatan lain yang dilakukan Tim Konsulen Hukum adalah bersama Tenaga Ahli Penegakan Hukum membantu Badan dalam menunjuk auditor sebagai ahli yang memberikan keterangan ahli pada proses penyidikan (Kepolisian dan Kejaksaan) dan/atau proses peradilan (Tingkat Pertama dan Banding) mengenai 13 kasus tersebut di atas.

7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana BPK-RI, sejak TA 1998/1999 sampai dengan TA 2004 telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk menambah jumlah sarana dan prasarana kerja, baik di Kantor Pusat maupun Perwakilan, antara lain yang berikut :

7.1 Kantor Pusat BPK-RI di Jakarta

Sejak awal TA 1998/1999 s.d. TA 2004, Kantor BPK-RI di Jakarta telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mengarah pada penambahan sarana dan prasarana, antara lain :

- a. Membebaskan tanah yang terletak di belakang gedung Kantor Pusat BPK-RI seluas 6.645,50 m² dilaksanakan pada Tahun 1998. Selanjutnya tanah tersebut disediakan untuk lokasi bangunan masjid, garasi, pantry dan kantin seluas 2.266 m². Bangunan-bangunan garasi, pantry dan kantin telah selesai pada bulan November 2003.

- b. Membangun masjid "*Baitul Hasib*" di halaman belakang gedung kantor pusat BPK-RI, Jl Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat, yang merupakan bangunan permanen berlantai dua seluas kurang-lebih 1.200 m², dengan biaya sebesar Rp.2.208,65 juta, yang berasal dari: (1) APBN sebesar Rp. 1.584,18 juta, (2) Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) sebesar Rp.450,00 juta, dan (3) sumbangan masyarakat sebesar Rp.174,47 juta. Pembangunannya dilaksanakan oleh PT Wiradanu Tunggal Cipta, dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Prof. KH. Ali Yafie, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 29 Juli 1999, dan selesai seluruhnya pada tanggal 1 Desember 2000.

Desain bangunan masjid dibuat oleh YAMP dan pengawasan pembangunannya dilakukan oleh PT Yodya Karya, sedangkan penamaan masjid "*Baitul Hasib*" yang berarti "*Rumah Maha Penghitung*" dilakukan oleh Prof KH Ali Yafie. Penggunaan Masjid Baitul Hasib, diresmikan pada tanggal 1 Desember 2000, oleh KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI.

Selanjutnya untuk memudahkan lalu-lintas umat islam dari gedung kantor ke masjid dan sebaliknya, pada tahun 2002 dinas membuat sebuah bangunan penghubung antar Lantai II Gedung Kantor dan Lantai II Masjid, yang pelaksanaan pembangunannya oleh PT Eka Aromatics 2002 dan PT Harvest Indo Perkasa, dengan biaya sebesar Rp. 376,05 juta.

- c. Membangun PUSDIKLAT Pegawai di Kalibata Jakarta dengan luas bangunan direncanakan sebesar 15.000 m², yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama, yaitu pembangunan 8 ruang kuliah, ruang administrasi, ruang laboratorium dan ruang perpustakaan seluas 3.000 m², peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Drs. Kunarto (Wakil Ketua BPK periode 1993-1998) pada tanggal 27 Januari 1998. Bangunan

tersebut telah selesai dan diresmikan penggunaannya oleh Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, Ketua BPK-RI pada tanggal 22 Maret 1999.

Bangunan tersebut ditambah dengan bangunan Gedung Lobby PUSDIKLAT seluas 1.200 m², yang penggunaannya diresmikan oleh Drs. Bambang Triadji, Wakil Ketua BPK-RI, pada tanggal 12 Juli 2001.

Selanjutnya dilengkapi pula dengan sarana Gedung Asrama PUSDIKLAT berlantai 7 seluas 5.380 m² yang mampu menampung 150 orang, yang pembangunannya dimulai pada tahun 2002 dan selesai pada awal tahun 2004, dan penggunaannya diresmikan oleh Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono, Ketua BPK-RI, pada tanggal 12 Februari 2004.

- d. Membangun dua unit wisma di lingkungan Kantor Pusat BPK-RI, masing-masing seluas 108 m² dan 200 m², selesai pada tahun 2002 dan telah dimanfaatkan untuk memfasilitasi pegawai Kantor Perwakilan BPK-RI yang sedang melaksanakan tugas pada Kantor Pusat BPK-RI di Jakarta.
- e. Pada akhir Tahun 2001 dan TA 2002, Biro Umum bekerja sama dengan Bagian Proyek Modernisasi Audit membangun/ merehabilitasi tiga jenis prasarana, yaitu: (a) menambah jaringan listrik khusus untuk komputer yang dapat berfungsi selama 24 jam pada seluruh ruangan, baik Gedung Utama maupun Gedung Arsip BPK-RI, (b) merehabilitasi ruang Laboratorium Bahasa yang terletak di Gedung Arsip lantai III, dan (c) membangun ruang Server Komputer yang terletak di Gedung Utama lantai I.
- f. Pada TA 2002, BPK-RI telah memperoleh 5 buah rumah jabatan dari Sekretariat Negara untuk 5 orang Anggota BPK-RI. Setelah dilakukan renovasi oleh Proyek Prasarana Fisik BPK-RI di Jakarta,

pada akhir tahun 2002 rumah-rumah jabatan tersebut ditempati oleh para Anggota BPK-RI.

7.2 Perwakilan II BPK-RI Palembang; mengadakan tanah untuk lokasi bangunan gedung kantor dan rumah jabatan sebanyak 3 persil masing-masing dengan luas : 3.030 m², 1.864 m² dan 449 m². Di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan sebagai berikut :

- a. Gedung Kantor seluas 2.616 m² yang pembangunannya melalui dua tahap, yaitu *Pembangunan Tahap I* meliputi pekerjaan Pondasi Gedung dan pekerjaan Struktur Gedung dengan biaya sebesar Rp.3.961,16 juta yang peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2003 oleh Sekjen BPK-RI dan telah selesai 100% pada bulan Desember 2003 dengan rekanan pelaksana PT Waskita Karya; *Pembangunan Tahap II* meliputi pekerjaan Arsitektur Gedung dan pekerjaan Sarana Penunjang Gedung dengan anggaran sebesar Rp.3.676,90 juta dengan rekanan pelaksana PT Waskita Karya, sampai dengan Juni 2004 perkembangannya masih 0%, karena DIP masih dalam proses pembahasan Kanwil VI DJA Palembang.
- b. Rumah Dinas sebanyak 12 unit untuk Kepala Perwakilan dan pejabat struktural dengan biaya pembangunan sebesar Rp.972,70 juta.

7.3 Perwakilan III BPK-RI Yogyakarta; mengadakan tanah seluas 4.242 m² dengan nilai Rp.3.935,19 juta, merehabilitasi gedung kantor, mes, dan museum BPK-RI serta merenovasi/menambah pagar gedung kantor Perwakilan IV BPK-RI di Denpasar.

7.4 Perwakilan IV BPK-RI Denpasar; mengadakan tanah seluas 6.254 m² untuk lokasi bangunan gedung kantor dan rumah dinas. Di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan sebagai berikut :

- a. *Gedung kantor Bagian A* seluas 865 m² dengan biaya pembangunan sebesar Rp.3.685,05 juta yang dikerjakan oleh PT Adi Murti dan diresmikan penggunaannya oleh Sekjen pada tanggal 24 April 2004, sedangkan gedung kantor Bagian B dan C dengan luas masing-masing 876 m² dan 434 m² , biaya pembangunannya dianggarkan sebesar Rp.4.985,50 juta. Kemajuan fisik pembangunan tersebut sampai dengan Juni 2004 sebesar 20,24% dan direncanakan selesai pada bulan November 2004.
- b. *Rumah Dinas* sebanyak 4 unit (satu unit T-124 dan tiga unit T-70) untuk Kepala Perwakilan dan pejabat struktural dengan biaya pembangunan sebesar Rp.552,77 juta.

7.5 Perwakilan V BPK-RI Banjarmasin; mengadakan tanah seluas 11.711 m² untuk keperluan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas sebagai berikut :

- a. *Gedung Kantor* seluas 1.400 m² dengan biaya pembangunan sebesar Rp.3.275,00 juta yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan diresmikan penggunaannya oleh Sekjen pada tanggal 14 Mei 2004.
- b. *Rumah Dinas* sebanyak 18 unit dengan biaya pembangunan sebesar Rp.1.084,37 juta.

7.6 Perwakilan VI BPK-RI Makassar; membangun Balai DIKLAT seluas 1.702 m² dengan anggaran sebesar Rp.7.717,07 juta yang dikerjakan oleh CV. Sari Persada dalam dua tahap, yaitu pembangunan tahap I dilaksanakan pada tahun 2003 meliputi pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur Gedung A dan Gedung B dengan realisasi biaya sebesar Rp.3.414,00 juta dan telah selesai 100% pada bulan November 2003. Pembangunan tahap II dilaksanakan pada tahun 2004 meliputi pekerjaan Arsitektur dan

Sarana Penunjang Gedung A dan Gedung B dengan anggaran sebesar Rp.4.303,07 juta. Kemajuan fisik pembangunan tersebut sampai dengan Juni 2004 sebesar 20% dan direncanakan selesai bulan Desember 2004.

Sebagai upaya untuk memperlancar tugas kedinasan para pejabat eselon I dan para pegawai di Kantor Pusat, pada tahun 2001 telah dilaksanakan pengadaan 7 buah sedan Mitsubhisi Lancer dan 4 buah sedan Suzuki Baleno, dua buah mini bus dan 1 buah ambulance serta 2 buah Bus. Rincian jumlah dan jenis kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, baik di lingkungan Kantor BPK Pusat maupun Kantor Perwakilan, dimuat dalam daftar berikut :

No	Perwakilan	Sedan	Jeep	Mini Bus	Bus	Spd Motor
1.	BPK Pusat	19	1	49	18	16
2.	Pwk. I Medan	1	1	7	1	5
3.	Pwk. II Palembang	1	2	2	-	4
4.	Pwk. III Yogyakarta	2	-	10	1	4
5.	Pwk. IV Denpasar	1	1	3	1	5
5.	Pwk. V Banjarmasin	2	-	5	-	2
6.	Pwk. VI Makassar	1	1	8	1	13
Jumlah		27	6	84	22	49

8. Kegiatan Non Kelembagaan

Selain kegiatan pengembangan kelembagaan, BPK-RI juga memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan non kedinasan yang bersifat menunjang kesejahteraan moril dan materiil bagi Keluarga Besar BPK-RI. Kegiatan-kegiatan dimaksud yaitu :

8.1 Kegiatan KORPRI

Dalam periode 1998-2004 telah terjadi penggantian Kepengurusan KORPRI Unit BPK-RI yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor Kep. 19/K-VI-

DPP/2001 tanggal 28 Juni 2001. Kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan selama periode 1998-2004 adalah sebagai berikut :

8.1.1 *Bidang Organisasi*; (1) melakukan sosialisasi hasil Munas Kelima KORPRI Tahun 1999 kepada pegawai di Perwakilan-perwakilan BPK-RI di Medan, Palembang, Yogyakarta, dan Makassar, bahwa KORPRI dengan paradigma baru sebagai organisasi yang netral dan mandiri; dan (2) melakukan pengukuhan dan pelantikan Pengurus Sub Unit KORPRI Perwakilan BPK-RI yang secara serentak dilakukan pada bulan Januari 2003 di Perwakilan I Medan, Perwakilan II Palembang, Perwakilan III Yogyakarta, Perwakilan V Banjarmasin, dan Perwakilan VI Makassar. Sedangkan pengukuhan dan pelantikan Pengurus Sub Unit KORPRI Perwakilan IV Denpasar dilaksanakan pada bulan April 2003.

8.1.2 *Bidang Usaha*; dalam rangka membantu kesejahteraan pegawai akan kebutuhan perumahan, Unit KORPRI BPK-RI memfasilitasi pemasaran perumahan yang dibangun oleh pihak ketiga, yang berlokasi dekat Komplek BPK-V Gandul kepada Anggota KORPRI Unit BPK-RI yang berminat membeli rumah dengan cara angsuran.

8.1.3 *Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME*; (1) Bintel Islam, dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagamaan, syiar dan pemberdayaan ummat, dan pemanfaatan dana BAZIS untuk bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak berprestasi atau anak yatim, bantuan kemanusiaan bagi warga BPK-RI yang terkena musibah, dan sumbangan untuk berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh warga BPK-RI; dan (2) Bintel Kristen/Katholik, dengan melaksanakan kegiatan keagamaan, kebaktian bulanan di Auditorium BPK-RI, menyelenggarakan peringatan hari-hari besar agama Kristen/Katholik, menyelenggarakan pemberian bantuan sembako kepada warga BPK-RI, dan melakukan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

8.1.4 *Pembinaan Sosial dan Budaya*; dilaksanakan dengan membentuk Badan Pembina Kesenian Unit KORPRI BPK-RI, yang bertugas membina kelompok kesenian jawa (karawitan), kelompok kesenian sunda, kelompok kesenian modern (band), dan kelompok kesenian keroncong.

8.1.5 *Pembinaan Olah Raga*; dilaksanakan dengan membentuk Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) Unit KORPRI BPK-RI yang bertugas menyelenggarakan senam kesegaran jasmani (SKJ), olah raga prestasi, dan olah raga kesehatan atau bela diri.

8.2 Koperasi

Koperasi BPK-RI didirikan pada tahun 1982 dengan akte pendirian yang disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan Surat Keputusan No. 127/BLK/1984 tanggal 30 November 1984 dan terdaftar dalam Daftar Umum pada tanggal 30 November 1984 dengan No. 1854/BH/I, bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya di lingkungan BPK-RI Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: melayani pengadaan dan penjualan barang-barang kebutuhan pegawai BPK-RI, dan melayani pinjaman uang pada pegawai BPK-RI yang sangat membutuhkan.

Jumlah Anggota Koperasi BPK-RI sampai dengan akhir Februari 2004 sebanyak 1.647 orang, dengan posisi dana :

- Iuran Pokok sebesar Rp 2.232.000,00
- Iuran Wajib sebesar Rp57.596.000,00
- Pengembalian iuran pokok/wajib dan pembayaran SHU sebesar Rp37.791.954,63

Kegiatan usaha Koperasi Pegawai BPK-RI dari Tahun 1999 sampai dengan akhir Februari 2004, meliputi: pembelian sebesar Rp.3.662,09 juta dan penjualan sebesar Rp. 4.106,33 juta.

8.3 Yayasan Cakra Bhakti

Yayasan Cakra Bhakti didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH nomor: 7 tanggal 5 Juli 1988 yang dibuat oleh Notaris Abdurachman Kadir, yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 1988 Nomor 18/CN.PDTIP/1988 sebagai pengganti Muhani Salim, SH. Saat ini Yayasan berkedudukan di Jakarta. Modal yang disetor oleh Pendiri yayasan adalah sebesar Rp. 1.000.000,00.

Maksud dan tujuan Yayasan ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta membina kerukunan segenap warga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, baik yang sedang berdinamis aktif, maupun para pensiunan, serta keluarganya masing-masing, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Warga Negara Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan melaksanakan berbagai kegiatan di bidang usaha, sosial, dan budaya, antara lain: (1) mengkoordinasikan dan/atau membimbing usaha dalam bidang swasta, (2) pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, (3) kesejahteraan keluarga, (4) kegiatan-kegiatan usaha di lapangan keolahragaan, (5) bakti pralaya (kematian), dan (6) mengusahakan dan menghimpun dana-dana guna pelaksanaan usaha-usaha tersebut di atas.

Dalam praktiknya usaha-usaha yang sudah dilakukan, meliputi : penyelenggaraan dana simpan-pinjam, usaha di bidang travel dengan mendirikan "PT Wisata Cakra Bhakti", usaha pendidikan dan kesejahteraan keluarga, usaha penerbitan/

percetakan dan cleaning service, dan pengurusan tanah/perumahan dengan mendirikan “PT Pentas Cakra Bhakti“, dan penerbitan Majalah Pemeriksa.

Pada awal Tahun 2002 kepengurusan dan kegiatan yayasan beserta semua unit usahanya ditata kembali, sehingga PT Pentas Cakra Bhakti, PT Wisata Cakra Bhakti, dan Majalah Pemeriksa secara tegas dinyatakan sebagai unit-unit usaha Yayasan Cakra Bhakti.

Sesuai dengan Laporan Auditor Independen KAP Husni Mucharam & Rasidi, neraca yayasan, PT Pentas Cakra Bhakti, PT Wisata Cakra Bhakti, dan Majalah Pemeriksa per 1 Januari 2003 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah Perkiraan			
	Yayasan Cakra Bhakti	PT Pentas Cakra Bhakti	PT Wisata Cakra Bhakti	Majalah Pemeriksa
Aktiva Lancar	179.005,82	225.017,11	6.228,50	118.360,96
Aktiva Tidak Lancar	537.675,61	1.570,00	540,00	Nihil
Jumlah Aktiva	716.681,43	226.587,11	6.768,50	118.360,96
Kewajiban Jangka Pendek	2.586,72	Nihil	Nihil	Nihil
Aktiva Bersih	714.094,71	226.587,11	6.768,50	118.360,96
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	716.681,43	226.587,11	6.768,50	118.360,96

8.4 Dharma Wanita

Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Setjen BPK-RI meliputi tiga bidang, yaitu: bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Selama periode Tahun 1998-2004 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain :

- a. Membina dua buah Sekolah Taman Kanak-kanak dan satu buah perpustakaan.
- b. Menyalurkan bea siswa SUPERSEMAR kepada 46 anak Anggota DWP Setjen BPK-RI yang berhak.
- c. Membagikan bantuan dana untuk pendidikan yang bersumber dari Ikatan Isteri Anggota (IKISTRA) BPK-RI, dan DWP Setjen BPK-RI kepada 275 Siswa SD, 193 Siswa SLTP dan 64 siswa SMU.
- d. Menjenguk Anggota DWP Setjen BPK-RI dan keluarganya yang sakit/kena musibah.
- e. Menyantuni 126 anak yatim dan anak Pegawai BPK-RI Golongan I.
- f. Mengelola Posyandu dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan, penimbangan anak BALITA/BATITA dan pemberian imunisasi dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional.
- g. Menerbitkan Bulletin Media Wanita BPK-RI.
- h. Mengadakan usaha simpan-pinjam dengan jumlah anggota sebanyak 63 orang.
- i. Mengelola kantin dan Mes di Komplek BPK I Kebon Jeruk.